

# **“ M. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 ”**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

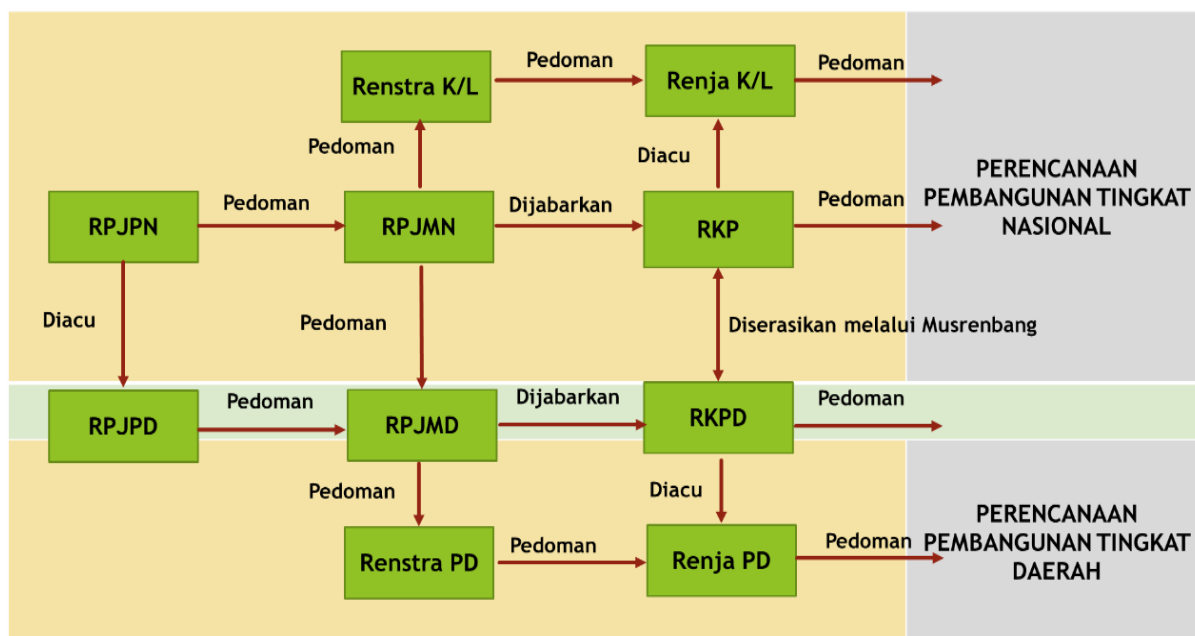
Rencana Kerja (Renja) disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Hal tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja menjadi pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, pengalokasian anggaran, serta instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang bertujuan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Diskominfo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu penyusunan Renja Diskominfo dapat dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Diskominfo, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Keterkaitan antara dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:



5/23/2017

Gambar I.1 : Keterkaitan antar Dokumen perencanaan

Dengan demikian Renja (PD) pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra (PD) dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja (PD) dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam laporan kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2026, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

- sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2026. .

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Perubahan Diskominfo adalah Dokumen Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam anggaran perubahan Tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang bertujuan :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026;
3. Menjadi dasar penyusunan RKA, sehingga Renja berperan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen penganggaran Pembangunan komunikasi dan informatika.
4. Menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja, dengan menetapkan indikator, target, serta capaian yang dapat diukur dan dievaluasi setiap tahun.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perencanaan pembangunan, karena Renja Diskominfo disusun dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, berbasis data, dan mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan dokumen Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I      Pendahuluan**

Memuat gambaran umum penyusunan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- Bab II Hasil Evaluasi Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu**  
Memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta review terhadap rancangan awal RKPD.
- Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**  
Berisi tujuan dan sasaran Renja serta program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2026. Antara lain memuat telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.
- Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
Berisi tentang kerangka pendanaan Tahun 2026 serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kabupaten Pematang
- Bab V Penutup**  
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat diketahui melalui laporan kinerja dan laporan keuangan.

Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Diskominfo tahun 2024. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang melaksanakan 5 (lima) program, 11 kegiatan (sebelas) dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika dari APBD Penetapan Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 11.847.462.600,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh

tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) kemudian terdapat pengurangan anggaran / efisiensi anggaran yaitu pada belanja perjalanan dinas, belanja cetak dan belanja makanan minuman sebesar Rp. 469.173.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan juta serratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menjadi sebesar Rp. 11,378,289,600,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pada Pergeseran Anggaran Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 2,295,240,000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian anggaran yaitu penambahan pokok-pokok pikiran sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), penambahan DBHCHT sebesar Rp. 245.240.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan penambahan untuk mendukung program prioritas sebesar Rp. 1.917.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah), sehingga pada Pergeseran Anggaran Tahun 2025 jumlah anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Adalah sebesar Rp. 13,673,529,600,- (tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Seiring berjalannya waktu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendapatkan tambahan anggaran Kembali yaitu untuk Publikasi Kegiatan Pembangunan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selain hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang juga mendapatkan tambahan anggaran dari Silpa DBHCHT Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 23.863.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), serta pengurangan pada belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 67,869,000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 13,789,523,600,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian yaitu Pengelolaan Informasi melalui penayangan media dan kerjasama publikasi Pemerintah Daerah dengan media sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan

puluh lima juta rupiah), Pelatihan TIK di SMK 1 Petarukan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Pelatihan TIK di Bulakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Pelatihan pada Jaringan Rakyat Nusantara Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sehingga total anggaran Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 14,674,523,600,- (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Adapun realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
  - Target Keuangan : Rp 5,941,090,985,-
  - Realisasi Keuangan : Rp 4,903,347,510,-
  - Target Fisik : 6,881 kegiatan
  - Realisasi Fisik : 6,372 kegiatan
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
  - Target Keuangan : Rp 1,422,661,100,-
  - Realisasi Keuangan : Rp 919,944,963,-
  - Target Fisik : 1,695 kegiatan
  - Realisasi Fisik : 2,104 kegiatan
3. Program Aplikasi Informatika
  - Target Keuangan : Rp 2,314,365,735,-
  - Realisasi Keuangan : Rp 1,349,063,882,-
  - Target Fisik : 125 kegiatan
  - Realisasi Fisik : 127 kegiatan
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - Target Keuangan : Rp 130,263,000,-
  - Realisasi Keuangan : Rp 64,873,700,-
  - Target Fisik : 266 kegiatan
  - Realisasi Fisik : 266 kegiatan
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
  - Target Keuangan : Rp 168,960,600,-
  - Realisasi Keuangan : Rp 148,751,000,-
  - Target Fisik : 43 kegiatan
  - Realisasi Fisik : 43 kegiatan

Berdasarkan penjelasan di atas maka diperoleh bahwa realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya sampai dengan Triwulan II yaitu sebesar Rp. 7.385.981.055,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) atau sebesar 54,55 %. Sedangkan untuk realisasi kinerja per sub kegiatan dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 2.1

REALISASI KINERJA FISIK T.A 2025  
DISKOMINFO  
BULAN AGUSTUS

Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama PPTK	Anggaran (Rp)	Indikator	Output	Perkembangan Fisik				
						Target	%Target	Realisasi	% Realisasi	Deviasi
	<b>BELANJA DAERAH</b>									
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika		13,540,529,600		9348	9,010	96.38%	8,912	95.34%	-1.05%
2.16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		13,053,625,300	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	9035	8,701	96.30%	8,603	95.22%	-1.08%
2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG</b>		8,131,550,415	Jumlah Kegiatan yang	6945	6,881	99.08%	6,372	91.75%	-7.33%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		104,171,430	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah yang tersusun	17	17	100.00%	14	82.35%	-17.65%
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	HESTI NURTIANA SUSMAYANTI,S.IP,M.Si	23,009,400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100.00%	3	60.00%	-40.00%
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	HESTI NURTIANA SUSMAYANTI,S.IP,M.Si	5,457,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	4	100.00%	4	100.00%	0.00%
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	HESTI NURTIANA SUSMAYANTI,S.IP,M.Si	2,726,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	4	100.00%	3	75.00%	-25.00%
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat	HESTI NURTIANA	72,979,030	Jumlah Laporan Evaluasi	4	4	100.00%	4	100.00%	0.00%
2.16.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan</b>		5,595,071,940		1236	1,216	98.38%	1,232	99.68%	1.29%
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	HESTI NURTIANA	5,578,748,000	Jumlah Orang yang	14	10	71.43%	10	71.43%	0.00%
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	HESTI NURTIANA SUSMAYANTI,S.IP,M.Si	6,259,800	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1216	1,200	98.68%	1216	100.00%	1.32%
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	HESTI NURTIANA	4,916,340	Jumlah Laporan Keuangan	2	2	100.00%	2	100.00%	0.00%
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	HESTI NURTIANA	5,147,800	Jumlah Laporan Keuangan	4	4	100.00%	4	100.00%	0.00%
2.16.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian</b>		388,488,400		501	471	94.01%	410	81.84%	-12.18%
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-	HELIN YULIASIH, SH	388,130,000	Jumlah Orang yang	500	470	94.00%	410	82.00%	-12.00%
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi	HELIN YULIASIH, SH	358,400	Jumlah Orang yang	1	1	100.00%	-	0.00%	-100.00%
2.16.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat</b>		161,313,590		73	72	98.63%	66	90.41%	-8.22%
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	HELIN YULIASIH, SH	2,897,500	Jumlah Paket Komponen	2	2	100.00%	1	50.00%	-50.00%
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah	HELIN YULIASIH, SH	13,390,000	Jumlah Paket Peralatan	7	7	100.00%	6	85.71%	-14.29%
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik	HELIN YULIASIH, SH	23,180,000	Jumlah Paket Bahan	22	21	95.45%	21	95.45%	0.00%
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan	HELIN YULIASIH, SH	11,988,000	Jumlah Paket Barang	15	15	100.00%	12	80.00%	-20.00%
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	HELIN YULIASIH, SH	26,489,900	Jumlah Paket	4	4	100.00%	3	75.00%	-25.00%

2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	HELIN YULIASIH, SH	2,110,000	Jumlah Laporan Fasilitasi	3	3	100.00%	3	100.00%	0.00%
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat	HELIN YULIASIH, SH	81,258,190	Jumlah Laporan	20	20	100.00%	20	100.00%	0.00%
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>118,222,500</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100.00%</b>	<b>10</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	HELIN YULIASIH, SH	118,222,500	Jumlah Unit Peralatan dan	10	10	100.00%	10	100.00%	0.00%
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang</b>		<b>1,529,219,425</b>		<b>5034</b>	<b>5,025</b>	<b>99.82%</b>	<b>4,590</b>	<b>91.18%</b>	<b>-8.64%</b>
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	HELIN YULIASIH, SH	20,000,000	Jumlah Laporan	5000	5,000	100.00%	4,565	91.30%	-8.70%
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	HELIN YULIASIH, SH	328,190,000	Jumlah Laporan	12	8	66.67%	8	66.67%	0.00%
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	HELIN YULIASIH, SH	24,892,000	Jumlah Laporan	10	9	90.00%	9	90.00%	0.00%
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	HELIN YULIASIH, SH	1,156,137,425	Jumlah Laporan	12	8	66.67%	8	66.67%	0.00%
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik</b>		<b>235,063,130</b>		<b>74</b>	<b>70</b>	<b>94.59%</b>	<b>50</b>	<b>67.57%</b>	<b>-27.03%</b>
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	HELIN YULIASIH, SH	105,580,130	Jumlah Kendaraan Dinas	23	19	82.61%	18	78.26%	-4.35%
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	HELIN YULIASIH, SH	10,000,000	Jumlah Mebel yang	15	15	100.00%	-	0.00%	-100.00%
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	HELIN YULIASIH, SH	36,355,000	Jumlah Peralatan dan	35	35	100.00%	31	88.57%	-11.43%
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	HELIN YULIASIH, SH	83,128,000	Jumlah Sarana dan	1	1	100.00%	1	100.00%	0.00%
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>		<b>1,464,013,200</b>		<b>1963</b>	<b>1,695</b>	<b>86.35%</b>	<b>2,104</b>	<b>107.18%</b>	<b>20.84%</b>
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan</b>		<b>1,464,013,200</b>		<b>1963</b>	<b>1,695</b>	<b>86.35%</b>	<b>2,104</b>	<b>107.18%</b>	<b>20.84%</b>
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	KURNIASIH PUJI	423,850,550	Jumlah aktivitas relasi	22	22	100.00%	22	100.00%	0.00%
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan	KURNIASIH PUJI	44,112,600	Jumlah Komunitas	5	5	100.00%	3	60.00%	-40.00%
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	KURNIASIH PUJI	85,015,800	Jumlah permohonan	12	12	100.00%	15	125.00%	25.00%
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan,	KURNIASIH PUJI	149,837,100	Jumlah rekomendasi	8	7	87.50%	5	62.50%	-25.00%
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi	KURNIASIH PUJI	628,601,150	Jumlah media komunikasi	4	4	100.00%	4	100.00%	0.00%
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	KURNIASIH PUJI RAHAYU, S.Kom, M.M	100,383,000	Jumlah Konten Informasi Publik	1812	1,545	85.26%	1955	107.89%	22.63%
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber	KURNIASIH PUJI	32,213,000	Jumlah ASN bidang	100	100	100.00%	100	100.00%	0.00%
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>		<b>3,458,061,685</b>		<b>127</b>	<b>125</b>	<b>98.43%</b>	<b>127</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.57%</b>
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di</b>		<b>3,458,061,685</b>		<b>127</b>	<b>125</b>	<b>98.43%</b>	<b>127</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.57%</b>
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE	EDI SUTRIYONO,	16,428,525	Jumlah laporan hasil	2	1	50.00%	2	100.00%	50.00%
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	EDI SUTRIYONO, SE.,M.Si	6,609,000	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data	1	1	100.00%	-	0.00%	-100.00%
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau	EDI SUTRIYONO,	5,600,000	Jumlah dokumen arsitektur	2	1	50.00%	1	50.00%	0.00%
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau	EDI SUTRIYONO,	235,200,000	Jumlah aplikasi khusus	1	1	100.00%	1	100.00%	0.00%
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi	EDI SUTRIYONO,	146,717,160	Jumlah perangkat daerah	40	40	100.00%	41	102.50%	2.50%
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra	EDI SUTRIYONO,	407,308,000	Jumlah perangkat daerah di	40	40	100.00%	41	102.50%	2.50%
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	EDI SUTRIYONO, SE.,M.Si	2,640,199,000	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan	41	41	100.00%	41	100.00%	0.00%
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>133,113,700</b>		<b>267</b>	<b>266</b>	<b>99.63%</b>	<b>266</b>	<b>99.63%</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM</b>		<b>133,113,700</b>		<b>267</b>	<b>266</b>	<b>99.63%</b>	<b>266</b>	<b>99.63%</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik</b>		<b>133,113,700</b>		<b>267</b>	<b>266</b>	<b>99.63%</b>	<b>266</b>	<b>99.63%</b>	<b>0.00%</b>
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas	TITI RESMIYATI, S.Sos	43,387,700	Jumlah pegawai yang	240	240	100.00%	240	100.00%	0.00%
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik	TITI RESMIYATI, S.Sos	89,726,000	Jumlah kegiatan statistik sel	27	26	96.30%	26	96.30%	0.00%
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>353,790,600</b>		<b>46</b>	<b>43</b>	<b>93.48%</b>	<b>43</b>	<b>93.48%</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM</b>		<b>353,790,600</b>		<b>46</b>	<b>43</b>	<b>93.48%</b>	<b>43</b>	<b>93.48%</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian</b>		<b>353,790,600</b>		<b>46</b>	<b>43</b>	<b>93.48%</b>	<b>43</b>	<b>93.48%</b>	<b>0.00%</b>
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi	TITI RESMIYATI, S.Sos	312,000,000	Jumlah Laporan	5	2	40.00%	2	40.00%	0.00%
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan	TITI RESMIYATI, S.Sos	41,790,600	Jumlah Perangkat Daerah	41	41	100.00%	41	100.00%	0.00%
			<b>Rp 13,540,529,600</b>							

Tabel 2.2  
REALISASI KEUANGAN T.A 2025

Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama PPTK	Anggaran (Rp)	Indikator	Output	Perkembangan Keuangan					
						Target Keuangan	Realisasi (SP2D)	Deviasi (Rp)	% bulanan	2025%	
	<b>BELANJA DAERAH</b>										
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika		13,540,529,600		9348	Rp 9,977,341,420	Rp 7,385,981,055	-Rp 2,591,360,365	74.03%	54.55%	
2.16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		13,053,625,300	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	9035	Rp 9,678,117,820	Rp 7,172,356,355	-Rp 2,505,761,465	74.11%	54.95%	
2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG</b>		8,131,550,415	Jumlah Kegiatan yang	6945	Rp 5,941,090,985	Rp 4,903,347,510	-Rp 1,037,743,475	82.53%	60.30%	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		104,171,430	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah yang tersusun	17	Rp 104,414,300	Rp 32,912,300	-Rp 71,502,000	31.52%	31.59%	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	HESTI NURTIANA SUSMAYANTI,S.IP,M.Si	23,009,400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 23,009,400	Rp 20,512,300	-Rp 2,497,100	89.15%	89.15%	
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	HESTI NURTIANA SUSMAYANTI,S.IP,M.Si	5,457,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Rp 5,457,000	Rp 4,800,000	-Rp 657,000	87.96%	87.96%	
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	HESTI NURTIANA SUSMAYANTI,S.IP,M.Si	2,726,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Rp 2,726,000	Rp 2,000,000	-Rp 726,000	73.37%	73.37%	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat	HESTI NURTIANA	72,979,030	Jumlah Laporan Evaluasi	4	Rp 73,221,900	Rp 5,600,000	-Rp 67,621,900	7.65%	7.67%	
2.16.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan</b>		5,595,071,940		1236	Rp 3,941,637,640	Rp 3,526,477,161	-Rp 415,160,479	89.47%	63.03%	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	HESTI NURTIANA	5,578,748,000	Jumlah Orang yang	14	Rp 3,925,380,500	Rp 3,512,559,411	-Rp 412,821,089	89.48%	62.96%	
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	HESTI NURTIANA SUSMAYANTI,S.IP,M.Si	6,259,800	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1216	Rp 6,193,000	Rp 6,259,750	Rp 66,750	101.08%	100.00%	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	HESTI NURTIANA	4,916,340	Jumlah Laporan Keuangan	2	Rp 4,916,340	Rp 3,622,000	-Rp 1,294,340	73.67%	73.67%	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	HESTI NURTIANA	5,147,800	Jumlah Laporan Keuangan	4	Rp 5,147,800	Rp 4,036,000	-Rp 1,111,800	78.40%	78.40%	
2.16.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian</b>		388,488,400		501	Rp 364,153,400	Rp 158,694,401	-Rp 205,458,999	43.58%	40.85%	
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-	HELIN YULIASIH, SH	388,130,000	Jumlah Orang yang	500	Rp 363,795,000	Rp 158,694,401	-Rp 205,100,599	43.62%	40.89%	
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi	HELIN YULIASIH, SH	358,400	Jumlah Orang yang	1	Rp 358,400	Rp -	-Rp 358,400	0.00%	0.00%	
2.16.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat</b>		161,313,590		73	Rp 159,913,590	Rp 114,954,078	-Rp 44,959,512	71.89%	71.26%	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	HELIN YULIASIH, SH	2,897,500	Jumlah Paket Komponen	2	Rp 2,897,500	Rp 565,000	-Rp 2,332,500	19.50%	19.50%	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah	HELIN YULIASIH, SH	13,390,000	Jumlah Paket Peralatan	7	Rp 13,390,000	Rp 5,245,000	-Rp 8,145,000	39.17%	39.17%	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	HELIN YULIASIH, SH	23,180,000	Jumlah Paket Bahan	22	Rp 21,780,000	Rp 19,183,200	-Rp 2,596,800	88.08%	82.76%	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan	HELIN YULIASIH, SH	11,988,000	Jumlah Paket Barang	15	Rp 11,988,000	Rp 4,852,850	-Rp 7,135,150	40.48%	40.48%	
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	HELIN YULIASIH, SH	26,489,900	Jumlah Paket	4	Rp 26,489,900	Rp 9,750,000	-Rp 16,739,900	36.81%	36.81%	
2.16.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	HELIN YULIASIH, SH	2,110,000	Jumlah Laporan Fasilitas	3	Rp 2,110,000	Rp 1,485,000	-Rp 625,000	70.38%	70.38%	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat	HELIN YULIASIH, SH	81,258,190	Jumlah Laporan	20	Rp 81,258,190	Rp 73,873,028	-Rp 7,385,162	90.91%	90.91%	
2.16.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		118,222,500		10	Rp 118,222,500	Rp 116,575,000	-Rp 1,647,500	98.61%	98.61%	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	HELIN YULIASIH, SH	118,222,500	Jumlah Unit Peralatan dan	10	Rp 118,222,500	Rp 116,575,000	-Rp 1,647,500	98.61%	98.61%	
2.16.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang</b>		1,529,219,425		5034	Rp 1,037,686,425	Rp 818,117,128	-Rp 219,569,297	78.84%	53.50%	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	HELIN YULIASIH, SH	20,000,000	Jumlah Laporan	5000	Rp 20,000,000	Rp 9,639,000	-Rp 10,361,000	48.20%	48.20%	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	HELIN YULIASIH, SH	328,190,000	Jumlah Laporan	12	Rp 218,627,000	Rp 169,145,901	-Rp 49,481,099	77.37%	51.54%	
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	HELIN YULIASIH, SH	24,892,000	Jumlah Laporan	10	Rp 21,892,000	Rp 13,292,000	-Rp 8,600,000	60.72%	53.40%	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	HELIN YULIASIH, SH	1,156,137,425	Jumlah Laporan	12	Rp 777,167,425	Rp 626,040,227	-Rp 151,127,198	80.55%	54.15%	
2.16.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik</b>		235,063,130		74	Rp 215,063,130	Rp 135,617,442	-Rp 79,445,688	63.06%	57.69%	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	HELIN YULIASIH, SH	105,580,130	Jumlah Kendaraan Dinas	23	Rp 85,580,130	Rp 55,456,842	-Rp 30,123,288	64.80%	52.53%	
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	HELIN YULIASIH, SH	10,000,000	Jumlah Mebel yang	15	Rp 10,000,000	Rp -	-Rp 10,000,000	0.00%	0.00%	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	HELIN YULIASIH, SH	36,355,000	Jumlah Peralatan dan	35	Rp 36,355,000	Rp 22,125,600	-Rp 14,229,400	60.86%	60.86%	

2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	HELIN YULIASIH, SH	83,128,000	Jumlah Sarana dan	1	Rp 83,128,000	Rp 58,035,000	-Rp 25,093,000	69.81%	69.81%
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>		<b>1,464,013,200</b>		<b>1963</b>	<b>Rp 1,422,661,100</b>	<b>Rp 919,944,963</b>	<b>-Rp 502,716,137</b>	<b>64.66%</b>	<b>62.84%</b>
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan</b>		<b>1,464,013,200</b>		<b>1963</b>	<b>Rp 1,422,661,100</b>	<b>Rp 919,944,963</b>	<b>-Rp 502,716,137</b>	<b>64.66%</b>	<b>62.84%</b>
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	KURNIASIH PUJI	423,850,550	Jumlah aktivitas relasi	22	Rp 423,850,550	Rp 214,939,200	-Rp 208,911,350	50.71%	50.71%
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan	KURNIASIH PUJI	44,112,600	Jumlah Komunitas	5	Rp 44,112,600	Rp 3,494,000	-Rp 40,618,600	7.92%	7.92%
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	KURNIASIH PUJI	85,015,800	Jumlah permohonan	12	Rp 85,015,800	Rp 34,463,000	-Rp 50,552,800	40.54%	40.54%
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan,	KURNIASIH PUJI	149,837,100	Jumlah rekomendasi	8	Rp 123,150,500	Rp 60,488,177	-Rp 62,662,323	49.12%	40.37%
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi	KURNIASIH PUJI	628,601,150	Jumlah media komunikasi	4	Rp 628,601,150	Rp 500,748,356	-Rp 127,852,794	79.66%	79.66%
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	KURNIASIH PUJI RAHAYU, S.Kom, M.M	100,383,000	Jumlah Konten Informasi Publik	1812	Rp 85,717,500	Rp 78,111,230	-Rp 7,606,270	91.13%	77.81%
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber	KURNIASIH PUJI	32,213,000	Jumlah ASN bidang	100	Rp 32,213,000	Rp 27,701,000	-Rp 4,512,000	85.99%	85.99%
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>		<b>3,458,061,685</b>		<b>127</b>	<b>Rp 2,314,365,735</b>	<b>Rp 1,349,063,882</b>	<b>-Rp 965,301,853</b>	<b>58.29%</b>	<b>39.01%</b>
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di</b>		<b>3,458,061,685</b>		<b>127</b>	<b>Rp 2,314,365,735</b>	<b>Rp 1,349,063,882</b>	<b>-Rp 965,301,853</b>	<b>58.29%</b>	<b>39.01%</b>
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE	EDI SUTRIYONO,	16,428,525	Jumlah laporan hasil	2	Rp 14,948,575	Rp 13,526,210	-Rp 1,422,365	90.48%	82.33%
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	EDI SUTRIYONO, SE.,M.Si	6,609,000	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data	1	Rp 5,769,000	Rp -	-Rp 5,769,000	0.00%	0.00%
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau	EDI SUTRIYONO,	5,600,000	Jumlah dokumen arsitektur	2	Rp 4,000,000	Rp -	-Rp 4,000,000	0.00%	0.00%
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau	EDI SUTRIYONO,	235,200,000	Jumlah aplikasi khusus	1	Rp 235,200,000	Rp -	-Rp 235,200,000	0.00%	0.00%
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi	EDI SUTRIYONO,	146,717,160	Jumlah perangkat daerah	40	Rp 140,885,160	Rp 130,659,380	-Rp 10,225,780	92.74%	89.06%
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra	EDI SUTRIYONO,	407,308,000	Jumlah perangkat daerah di	40	Rp 407,308,000	Rp 126,401,500	-Rp 280,906,500	31.03%	31.03%
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	EDI SUTRIYONO, SE.,M.Si	2,640,199,000	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan	41	Rp 1,506,255,000	Rp 1,078,476,792	-Rp 427,778,208	71.60%	40.85%
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>133,113,700</b>		<b>267</b>	<b>Rp 130,263,000</b>	<b>Rp 64,873,700</b>	<b>-Rp 65,389,300</b>	<b>49.80%</b>	<b>48.74%</b>
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM</b>		<b>133,113,700</b>		<b>267</b>	<b>Rp 130,263,000</b>	<b>Rp 64,873,700</b>	<b>-Rp 65,389,300</b>	<b>49.80%</b>	<b>48.74%</b>
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik</b>		<b>133,113,700</b>		<b>267</b>	<b>Rp 130,263,000</b>	<b>Rp 64,873,700</b>	<b>-Rp 65,389,300</b>	<b>49.80%</b>	<b>48.74%</b>
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas	TITI RESMIYATI, S.Sos	43,387,700	Jumlah pegawai yang	240	Rp 43,387,700	Rp 30,240,700	-Rp 13,147,000	69.70%	69.70%
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik	TITI RESMIYATI, S.Sos	89,726,000	Jumlah kegiatan statistik sek	27	Rp 86,875,300	Rp 34,633,000	-Rp 52,242,300	39.87%	38.60%
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>353,790,600</b>		<b>46</b>	<b>Rp 168,960,600</b>	<b>Rp 148,751,000</b>	<b>-Rp 20,209,600</b>	<b>88.04%</b>	<b>42.04%</b>
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM</b>		<b>353,790,600</b>		<b>46</b>	<b>Rp 168,960,600</b>	<b>Rp 148,751,000</b>	<b>-Rp 20,209,600</b>	<b>88.04%</b>	<b>42.04%</b>
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian</b>		<b>353,790,600</b>		<b>46</b>	<b>Rp 168,960,600</b>	<b>Rp 148,751,000</b>	<b>-Rp 20,209,600</b>	<b>88.04%</b>	<b>42.04%</b>
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi	TITI RESMIYATI, S.Sos	312,000,000	Jumlah Laporan	5	Rp 127,170,000	Rp 123,474,500	-Rp 3,695,500	97.09%	39.58%
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan	TITI RESMIYATI, S.Sos	41,790,600	Jumlah Perangkat Daerah	41	Rp 41,790,600	Rp 25,276,500	-Rp 16,514,100	60.48%	60.48%
			<b>Rp 13,540,529,600</b>				<b>Rp 7,385,981,055</b>			

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan serta Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Capaian kinerja pelayanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik dapat Adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2025

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase ketersediaan informasi publik	Indeks	Na	Na	Na	66,00	70	74	80	88	88
2.	Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	%	Na	Na	Na	1	5,00	15	28	78,8	-
3.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	Na	Na	Na	66,00	41,18	75	80	100	100
4.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	Na	Na	Na	27,00	51,30	79	80	80	-
5.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	Na	Na	Na	40,00	50	50	100	100	100
6.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	Na	Na	Na	30,00	40	70	91	100	100
7.	Persentase <i>Network</i> terintegrasi	%	20	25	30	70,73	70,73	72	73	88	-
8.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	Na	Na	Na	70,73	70,73	100	100	100	100

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2025

Tabel 2.4  
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2025

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar	%	0	0	2	22	31	32	32	-
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Na	Na	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Na	Na	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.5  
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2025

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase konten informasi yang telah diamankan (%)	%	Na	0,85	20	41	40	96,3	100	100
2.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	Na	Na	20	20	40	32,5	34	-

*Sumber : Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2025*

### 2.3 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga merupakan indikator tolak ukur terkait akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 70,60 sehingga mendapat penilaian dengan kategori BB (Sangat Baik), Capaian pada tahun 2024 berhasil menaikkan nilai sebesar 4,35 dengan interpretasi mengoptimalkan menggunakan aplikasi manajemen kinerja, membuat peta proses bisnis dan manajemen risiko serta meningkatkan pencapaian pada seluruh target kinerja.

Nilai pada tahun 2024 tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Evaluasi SAKIP Diskominfo

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	21
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,50
4.	Evaluasi Internal	25	17,50
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>70,60</b>

Sedangkan untuk Capaian Kinerja Program Prioritas Bupati Pemalang dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Program Internet Gratis Desa Wujud Nyata Visi Misi Bupati Pemalang Menuju Digitalisasi Desa**

#### **a) Latar belakang**

Kabupaten Pemalang sedang menapaki era transformasi digital yang signifikan. Salah satu bukti nyatanya adalah program Internet Gratis Desa, yang merupakan amanah dari visi misi Bupati Pemalang. Program strategis ini dirancang untuk memutus kesenjangan digital dan membuka akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat, khususnya yang berada di pelosok desa.

Internet telah berubah dari sekadar kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer. Akses internet yang cepat dan terjangkau adalah kunci untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pemerintahan yang modern. Namun, tidak semua lapisan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan pelosok di Pemalang, memiliki akses yang merata ke dunia digital.

Kesenjangan digital ini menghambat potensi pertumbuhan desa. Pelajar kesulitan mengakses materi belajar online, pelaku UMKM terkendala memasarkan produknya secara digital, dan layanan pemerintahan desa pun belum sepenuhnya terintegrasi secara online. Berangkat dari permasalahan inilah, Bupati Pemalang menjadikan Internet Gratis Desa sebagai salah satu program unggulan dalam visi misinya, dengan tujuan menciptakan Pemalang Bercahaya : Bersih, Cakap, Handal dan Mulyayang Maju.

## **b) Perencanaan**

Program Internet Gratis Desa dirancang dengan matang dan terstruktur untuk memastikan implementasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Beberapa aspek perencanaannya meliputi:

1. Pemetaan Daerah: Dilakukan identifikasi terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Pematang Jaya.
2. Penyediaan Infrastruktur: Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan penyedia layanan internet (ISP) terpercaya untuk memasang alat di titik akses (access point) di lokasi-lokasi strategis.
3. Penganggaran: Mengalokasikan dana APBD yang cukup untuk pembangunan infrastruktur dan biaya operasional selama periode program berjalan.
4. Skema Pelaksanaan Bertahap: Program ini dilaksanakan dalam dua tahap untuk memastikan kualitas dan coverage yang maksimal:

Tahap Pertama: Menjangkau 93 desa yang dilaksanakan mulai bulan Juni sampai Desember 2025.

Tahap Kedua: Menjangkau 119 desa lainnya dan dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai Desember 2025.

## **c) Pelaksanaan**

Pelaksanaan program berjalan sesuai dengan skema bertahap yang telah direncanakan :

1. Tahap Pertama (93 Desa dalam 7 Bulan): Tahap ini difokuskan pada desa-desa yang terdekat dari Kantor Kecamatan yang telah tersedia jaringan Fiber Optik untuk memastikan ketepatan waktu dalam memenuhi program 100 Hari Kinerja Bupati Pematang Jaya. Prosesnya meliputi penarikan kabel fiber optik, pemasangan perangkat WiFi di Fasilitas Umum seperti sekolah, Polindes, dan tempat publik lainnya. Masyarakat sudah dapat menikmati akses internet gratis dengan kualitas yang memadai dengan kapasitas bandwidth 50 Mbps broadband untuk kegiatan belajar, berusaha, dan berkomunikasi.
2. Tahap Kedua (119 Desa dalam 3 Bulan): Dengan pembelajaran dari tahap pertama, tahap kedua dilaksanakan dengan lebih efisien untuk memperluas jangkauan ke lebih banyak desa. Dalam waktu yang relatif singkat, 3 bulan, tambahan 119 desa memastikan 212 desa terlayani dengan jaringan internet gratis. Keberhasilan dua tahap ini berarti seluruh desa di Kabupaten Pematang Jaya telah merasakan manfaat dari program ini.

Tidak hanya sekedar menyediakan akses, program ini diharapkan dapat mengintervensi pasar internet di desa agar lebih berkualitas dan terjangkau oleh Masyarakat, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan internet untuk hal-hal yang produktif dan edukatif agar pembentukan ekosistem digital di desa berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat desa.

#### **d) Penutup**

Keberhasilan program Internet Gratis Desa merupakan langkah penting bagi transformasi digital desa di Kabupaten Pematang Jaya. Program ini bukan hanya tentang memberikan fasilitas internet secara cuma-cuma, tetapi lebih tentang membangun jalan digital yang memungkinkan setiap warga, di mana pun berada, untuk bersaing dan berkembang di panggung global.

Program ini adalah wujud nyata dari komitmen Bupati Pematang Jaya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Dengan terhubungnya seluruh desa, diharapkan dapat memicu gelombang inovasi baru, mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Internet Gratis Desa telah menjadi fondasi kokoh di dunia digital.

## **2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya**

### **1) Permasalahan Keterbukaan Informasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya sebagai PPID utama Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya mengupayakan keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik dapat berjalan dengan baik,

permasalahan yang timbul dalam implementasi UU Keterbukaan informasi publik adalah kesiapan seluruh badan publik untuk menyediakan seluruh layanan informasi publik yang belum menyeluruh, belum semua badan publik termasuk dalam kategori informatif. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang UU KIP, hingga implementasi yang belum efektif di berbagai badan publik. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan sebagai leading sektor layanan pengaduan di Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang senantiasa memberikan respon dan tanggapan yang cepat pada aduan yang masuk. Namun pada penyelesaian aduan yang melibatkan OPD lain terkadang masih ada beberapa respon yang lambat dari pengelola aduan di masing-masing OPD sehingga perlu lebih ditingkatkan komitmen dari seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memberikan dukungan pada pengelolaan dan penyelesaian aduan.

## 2) Permasalahan Pengembangan SPBE

Pelaksanaan SPBE memerlukan fondasi dan regulasi yang kuat dan menyeluruh agar dapat berjalan dengan konsisten, terukur, dan berkelanjutan di instansi pemerintahan. Namun hingga saat ini ketersediaan regulasi terkait pelaksanaan SPBE belum semua dapat terpenuhi. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan SPBE banyak menghadapi berbagai permasalahan seperti mengintegrasikan berbagai sistem digital yang berjalan secara terpisah, masih terjadinya tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, adanya duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, standardisasi TIK yang belum optimal, pemanfaatan data dan informasi yang bisa dibagikan yang belum maksimal sehingga arsitektur SPBE yang tepat dan terarah memberikan peluang untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan terintegrasi dengan baik dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur. Dengan adanya arsitektur yang terintegrasi, data dapat diakses dan dianalisis dengan lebih cepat, yang pada akhirnya akan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam hal ini diperlukan kolaborasi/cross cutting dengan beberapa perangkat daerah dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan dan implementasi SPBE. Sementara itu, pengembangan SPBE dalam aspek infrastruktur telematika, masalah yang terjadi adalah perkembangan

teknologi menuntut penyesuaian peningkatan keterampilan SDM pengelola, meningkatnya ancaman keamanan siber, ketidakpastian ekonomi dapat mengganggu perencanaan penganggaran terkait infrastruktur jaringan, perkembangan kebutuhan data dan informasi yang meningkat membutuhkan penyesuaian kemampuan kapasitas infrastruktur jaringan, perlunya peremajaan perangkat jaringan yang usia pemakaiannya sudah melebihi standar, ketergantungan kinerja organisasi pada teknologi digital menuntut penanganan kendala pada infrastruktur jaringan yang lebih cepat serta perubahan regulasi menuntut adanya penyesuaian terhadap pengelolaan infrastruktur jaringan.

### 3) Permasalahan Penyelenggaraan Statistik Sektor

Dalam upaya peningkatan pembangunan statistik di Indonesia telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan Satu Data Indonesia (SDI) diharapkan akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan statistik sektoral yaitu pengelolaan data statistik sektoral yang dilaksanakan oleh perangkat daerah guna menghasilkan data statistik yang berkualitas belum dilaksanakan pengelolaan data statistik sektoral yang sesuai standar. Nilai rata-rata Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Pematang Jaya saat ini adalah 2,59 masih dalam kategori cukup, yaitu proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri. Perangkat daerah masih kesulitan dalam mengidentifikasi kegiatan statistik yang dilakukan. Pembinaan dalam hal identifikasi kegiatan statistik bersama dengan BPS Kabupaten Pematang Jaya kepada seluruh perangkat daerah sudah mulai dilakukan pada tahun 2025 tetapi masih perlu dilakukan pembinaan secara intens kepada masing-masing perangkat daerah untuk mengidentifikasi kegiatan statistik.

### 4) Permasalahan Peningkatan Keamanan Informasi

Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan terkait keamanan data dan privasi pengguna menjadi semakin kompleks. Menjaga keamanan data dan melindungi privasi pengguna adalah tugas krusial, dan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan solusi

inovatif. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang mengupayakan dengan mengidentifikasi tantangan dan menerapkan solusi yang tepat, memitigasi risiko terkait keamanan data dan privasi pengguna, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang adalah risiko keamanan informasi yakni ancaman yang terkait dengan informasi yang disimpan, diolah, dan dipertukarkan oleh sebuah organisasi atau individu. Informasi ini dapat berupa data sensitif seperti informasi keuangan, informasi pribadi, informasi kesehatan, dan informasi rahasia lainnya. Ancaman keamanan informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti *hacker*, virus komputer, kegagalan sistem, kejahatan siber, dan insiden keamanan lainnya. Oleh karena itu, risiko keamanan informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi dan individu. Permasalahan selanjutnya adalah kesadaran keamanan informasi (*IT security awareness*) yang belum menyeluruh pada aparatur di Pemerintah Kabupaten Pematang. Kesadaran keamanan informasi adalah kemampuan individu atau organisasi untuk memahami dan mengenali risiko keamanan informasi serta melakukan tindakan untuk mengurangi risiko tersebut. Kesadaran keamanan informasi penting karena dapat membantu organisasi dan individu untuk menghindari serangan siber dan kehilangan data yang sensitif.

#### **2.4.1 Isu strategis**

Isu strategis adalah situasi yang memiliki potensi menjadi tantangan atau peluang bagi suatu daerah di masa mendatang. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang, isu-isu strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Isu-isu ini mencerminkan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Isu strategis berdasarkan tidak hanya mendasarkan pada hasil analisis data yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga dengan memperhatikan potensi, isu KLHS, global, nasional, regional dan daerah. Dapat disimpulkan bahwa isu strategis pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pematang tahun 2025-2029 adalah **belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan data statistik sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan juga masih perlu ditingkatkan, termasuk aspek keamanan data yang menjadi landasan penting dalam era digital saat ini. Kurangnya optimalisasi ini berpotensi menghambat kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam memperkuat sistem teknologi informasi, meningkatkan literasi digital di lingkungan pemerintah, serta memastikan perlindungan data melalui penerapan standar keamanan informasi yang memadai.

## **2.5** Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dijelaskan sesuai tabel berikut ini :

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Pematang Tahun Anggaran 2026	

Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan</b>
----------------------------------------------------------------------

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah								
				Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1			
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)		
Dinas Komunikasi dan Informatika												
2												
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	18	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 1.428.220.000,00	Rp. 291.400.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.719.620.000,00	Rp. 0,00		
2	18	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.428.220.000,00	Rp. 291.400.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.719.620.000,00	Rp. 0,00		
2	18	02	2.01	0014 Relasi Media	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0
2	18	02	2.01	0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 180.620.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 180.620.000,00	Rp. 0
2	18	02	2.01	0017 Pelayanan Informasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 90.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 90.000.000,00	Rp. 0
2	18	02	2.01	0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 110.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 110.000.000,00	Rp. 0
2	18	02	2.01	0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 437.600.000,00	Rp. 291.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 729.000.000,00	Rp. 0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					Jumlah (Rp)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0	
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			Rp. 3.726.800.000,00	Rp. 59.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.785.800.000,00	Rp. 0,00	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 3.726.800.000,00	Rp. 59.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.785.800.000,00	Rp. 0,00	
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 195.715.000,00	Rp. 47.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 242.715.000,00	Rp. 0	
2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 42.100.000,00	Rp. 12.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 54.100.000,00	Rp. 0	
2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 75.785.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 75.785.000,00	Rp. 0	
2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 87.965.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 87.965.000,00	Rp. 0	
2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.511.957.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.511.957.000,00	Rp. 0	
2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 173.952.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 173.952.000,00	Rp. 0	
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 639.126.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 639.126.000,00	Rp. 0	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 7.819.296.000,00	Rp. 97.670.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.916.966.000,00	Rp. 0,00	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 190.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 190.000.000,00	Rp. 0,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 95.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 95.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 5.575.491.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.575.491.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.560.491.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.560.491.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 283.439.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 283.439.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 4.992.318,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.992.318,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 13.845.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.845.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 14.950.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.950.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 20.005.250,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.005.250,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 14.250.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.250.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 185.396.432,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 185.396.432,00	Rp. 0
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 3.320.000,00	Rp. 97.670.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 100.990.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.320.000,00	Rp. 97.670.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.990.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 1.584.081.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.584.081.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 14.100.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.100.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 331.220.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 331.220.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 13.501.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.501.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.225.260.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.225.260.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 182.965.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 182.965.000,00	Rp. 0,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 137.965.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 137.965.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 45.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 45.000.000,00	Rp. 0
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00
2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0
2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 7.819.296.000,00	Rp. 97.670.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.916.966.000,00	Rp. 0,00
2	20	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 190.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 190.000.000,00	Rp. 0,00
2	20	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 80.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 80.000.000,00	Rp. 0
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Rp. 376.300.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 376.300.000,00	Rp. 370.000.000,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 376.300.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 376.300.000,00	Rp. 370.000.000,00
2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 306.300.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 306.300.000,00	Rp. 250.000.000,00



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### 3.1 Tujuan

Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Pemalang yaitu “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA” dengan mendukung misi ke 7 (tujuh) Digitalisasi yaitu : Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan tujuan sebagai berikut :

**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang diatas ditetapkan indikator kinerja Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dengan perhitungan sebagai berikut

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi	Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)	indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6

#### 3.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Sasaran yang akan dicapai Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu tahun 2025-2029 yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

**Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi**

Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja jangka menengah tahun 2025-2029 pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat dirinci pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi		Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	
		Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi	Nilai Domain Layanan	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,59	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	
			Nilai Domain Tata Kelola	2,4	3	3,2	3,4	3,6	3,8	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026, dan sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintah Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rumusan Rencana Pendanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Rencana Pendanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Pematang Tahun Anggaran 2026	

Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan</b>
----------------------------------------------------------------------

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1
				Tahun - 1	Tahun N				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
Dinas Komunikasi dan Informatika									
2									
2	16								
2	16	02							
2	16	02	2.01						
2	16	02	2.01	0014					
2	16	02	2.01	0015					
2	16	02	2.01	0017					
2	16	02	2.01	0019					
2	16	02	2.01	0021					

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0	
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			Rp. 3.726.600.000,00	Rp. 59.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.785.600.000,00	Rp. 0,00	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 3.726.600.000,00	Rp. 59.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.785.600.000,00	Rp. 0,00	
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 195.715.000,00	Rp. 47.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 242.715.000,00	Rp. 0	
2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 42.100.000,00	Rp. 12.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 54.100.000,00	Rp. 0	
2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 75.785.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 75.785.000,00	Rp. 0	
2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 87.965.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 87.965.000,00	Rp. 0	
2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.511.957.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.511.957.000,00	Rp. 0	
2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 173.952.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 173.952.000,00	Rp. 0	
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 639.126.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 639.126.000,00	Rp. 0	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 7.819.296.000,00	Rp. 97.670.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.916.966.000,00	Rp. 0,00	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 190.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 190.000.000,00	Rp. 0,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 137.965.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 137.965.000,00	Rp. 0
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 45.000.000,00	Rp. 0
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00
2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 55.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0
2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.819.296.000,00	Rp. 97.670.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.916.966.000,00	Rp. 0,00
2	20	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 190.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 190.000.000,00	Rp. 0,00
2	20	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 80.000.000,00	Rp. 0
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Rp. 376.300.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 376.300.000,00	Rp. 370.000.000,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 376.300.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 376.300.000,00	Rp. 370.000.000,00
2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 306.300.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 306.300.000,00	Rp. 250.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 95.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 95.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 5.575.491.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.575.491.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.580.491.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.580.491.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 283.439.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 283.439.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.992.318,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.992.318,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.845.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.845.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.950.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.950.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.005.250,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.005.250,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.250.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.250.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 185.396.432,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 185.396.432,00	Rp. 0
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 3.320.000,00	Rp. 97.670.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 100.990.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.320.000,00	Rp. 97.670.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.990.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.584.081.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.584.081.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.100.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.100.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 331.220.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 331.220.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.501.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.501.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.225.260.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.225.260.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 182.965.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 182.965.000,00	Rp. 0,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 70.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 70.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	
Jumlah									Rp. 13.405.416.000,00	Rp. 448.070.000,00			Rp. 13.853.486.000,00	Rp. 370.000.000,00
								Kab. Pemalang..... Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika   JOKO NGATMO, S.E., M.Si. NIP. 196808251993031004						

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2026, sebagai evaluasi atas Rencana Kerja Triwulan III pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagai dasar dalam penyusunan usulan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai bidang dan tugas fungsinya, serta mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2026, yang lebih terkoordinasi, sekaligus mencapai Visi Kabupaten Pemalang yaitu:

“ Pemalang Bercahaya – Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan dengan Misi RHAPSODI – Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, Ikhlas “.

Demikian penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2026, kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat kekurangan, Oleh sebab itu diperlukan masukan dan saran dari semua pihak terkait guna penyempurnaan penyusunan Renja pada periode berikutnya.

Pemalang, 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Pemalang

JOKO NGATMO, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680825 199303 1 004